

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di deskripsikan tentang hasil dan pembahasan. Pada bab ini berisi tentang beberapa sub bab, sub bab *pertama* menjelaskan tentang sejarah kota Surabaya, sub bab *kedua* berisi tentang profil organisasi, sub bab *ketiga* berbicara tentang eksistensi kelompok LGBT di Kota Surabaya, sub bab *keempat* ruang bagi kelompok LGBT Surabaya, sub bab *kelima* Realitas Jaminan Hak Asasi Manusia Kelompok LGBT Kota Surabaya, sub bab *keenam* upaya kelompok LGBT dalam memperoleh hak politik.

A. Profil Kota Surabaya

Cerita sejarah Kota Surabaya kental dengan nilai kepahlawanan. Sejak awal berdirinya, kota ini memiliki sejarah panjang yang terkait dengan nilai-nilai heroisme. Istilah Surabaya terdiri dari kata *sura* (berani) dan *baya* (bahaya), yang kemudian secara harfiah diartikan sebagai berani menghadapi bahaya yang datang. Nilai kepahlawanan tersebut salah satunya mewujud dalam peristiwa pertempuran antara Raden Wijaya dan pasukan Mongol pimpinan Kubilai Khan di tahun 1293. Begitu bersejarah pertempuran tersebut hingga tanggalnya diabadikan menjadi tanggal berdirinya Kota Surabaya hingga saat ini, yaitu 31 Mei.¹

Sejarah Surabaya juga berkaitan dengan aktivitas perdagangan secara geografis Surabaya memang diciptakan sebagai kota dagang dan pelabuhan.

¹ <http://www.surabaya.go.id/profilkota/index.php?id=1> (website resmi Kota Surabaya) di akses 26-06-2103 23:15 WIB

Surabaya merupakan pelabuhan gerbang utama Kerajaan Majapahit. Letaknya yang di pesisir utara pulau Jawa membuatnya berkembang menjadi sebuah pelabuhan penting di zaman Majapahit pada abad ke – 14.

Ada banyak versi mengenai asal usul nama kota Surabaya ini, namun semuanya berkaitan erat dengan kemenangan Raden Wijaya saat melawan pasukan Tartar. Versi *pertama*, menurut sebagian buku, Surabaya berasal dari kata Sura dan baya. Sura berarti jaya dan menang, selamat. Sedangkan baya artinya bahaya. Sehingga Surabaya kurang lebih artinya “selamat dari bahaya”. *kedua*, berasal dari kata suro dan boyo kata suro berarti ikan suro sebuah ikan hiu yang besar, dan boyo berarti buaya.²

Surabaya adalah ibu kota Propinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai Kota Pahlawan.

Letak : 07 derajat 9 menit – 07 derajat 21 menit LS
(Lintang Selatan) dan 112 derajat 36 menit – 112
derajat 54 menit BT (Bujur Timur)

Ketinggian : 3-5 meter di atas permukaan air laut (daratan
rendah), kecuali di bagian selatan terdapat dua
bukit landai di daerah Lidah dan Gayungan
dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan
air laut.

Batas : Sebelah Utara : Selat Madura
Sebelah Timur : Selat Madura

² <http://www.sejarahkota.com/2013/03/sejarah-asal-usul-surabaya.html>

Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo

Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Luas Wilayah	: 33.306,30 Ha
Jumlah Kecamatan	: 31
Jumlah Desa/kelurahan	: 160
Kelembapan Udara	: rata-rata minimum 50% dan maksimum 92%
Tekanan Udara	: rata-rata minimum 1012,5 Mbs dan maksimum 1042,3 Mbs
Temperatur	: rata-rata minimum 23,6 °C dan maksimum 33,8 °C
Musim kemarau	: Mei – Oktober
Musim hujan	: Nopember – April
Curah Hujan	: rata-rata 165,3 mm, curah hujan diatas 200 mm terjadi pada bulan Januari s/d Maret dan Nopember s/d Desember
Kecepatan angin	: rata-rata 6,4 Knot dan maksimum 20,3 Knot
Arah Angin	: Januari : Barat
	Februari : Barat-barat laut
	Maret : Barat-barat laut
	April : Barat-barat laut
	Mei : Timur
	Juni : Timur
	Juli : Timur

Agustus : Timur

September : Timur

Oktober : Timur

Nopember : Timur barat

Desember : Barat-barat laut

Penguapan Panci terbuka : Rata-rata 143,2

Struktur tanah : Terdiri atas tanah aluvial, hasil endapan sungai dan pantai, di bagian barat terdapat perbukitan yang mengandung kapur tinggi.

Topografi : 80% dataran rendah, ketinggian 3-6 m, kemiringan < 3% 20 % perbukitan dengan gelombang rendah, ketinggian < 30m dan kemiringan 5-15%.³

Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya budaya. Beragam etnis ada di Surabaya. Seperti etnis Melayu, Cina, India, Arab, dan Eropa. Etnis Nusantara pun dapat dijumpai seperti Madura, Sunda, Batak, Kalimantan, Bali, Sulawesi yang membaaur dengan penduduk asli Surabaya membentuk pluralisme budaya yang selanjutnya menjadi ciri khas kota Surabaya. Sebagian besar masyarakat Surabaya adalah orang Surabaya asli dan orang Madura. Ciri khas masyarakat asli Surabaya adalah mudah bergaul. Gaya berbicara terbuka. Walaupun tampak seperti bertempramen kasar, masyarakat Surabaya sangat demokratis, toleran.

³ <http://www.surabaya.go.id/profilkota/index.php?id=1> (website resmi Kota Surabaya) di akses 26-06-2103 23:15 WIB

Dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 3,110,187 orang di Tahun 2012, Kota Surabaya berkembang sebagai Kota Metropolitan. Posisi strategis Kota Surabaya sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat sembuatnya selalu dinamis. Menjadi pusat aktivitas sama artinya menjadi jujugan bagi orang dari berbagai daerah. Jumlah penduduk jelas akan semakin meningkat seiring pesona Kota Surabaya yang menjanjikan segala macam kemudahan. Maka tantangan besar berikutnya ialah menyiapkan kehidupan yang layak. Kota Surabaya haruslah menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi penghuninya. Surabaya telah mengkalim dirinya sebagai Kota Jasa dan Perdagangan. Lebih dari itu Kota Surabaya adalah Kota bisnis dengan berbagai aktivitas yang berlangsung. Ibarat sebuah toko, Surabaya adalah toko serba ada. Didalamnya berlangsung segala aktivitas, serta tersedia fasilitas yang mendukung.⁴

Berlanjut pada masa kolonial, letak geografisnya yang sangat strategis membuat pemerintah Kolonial Belanda pada abad ke - 19, memosisikannya sebagai pelabuhan utama yang berperan sebagai *collecting centers* dari rangkaian terakhir kegiatan pengumpulan hasil produksi perkebunan di ujung Timur Pulau Jawa, yang ada di daerah pedalaman untuk diekspor ke Eropa.⁵

Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah ibu kota Jakarta. Kota pahlawan ini mengalami perkembangan pesat terutama di daerah Surabaya Barat dan Surabaya Timur, ditunjukkan dengan

⁴ <http://www.surabaya.go.id/profilkota/index.php?id=1> (website resmi Kota Surabaya) di akses 26-06-2103 23:15 WIB

⁵ *Ibid.*,

peningkatan pertumbuhan penduduk dan perubahan peruntukan lahan yang semakin cepat. Hal ini terjadi karena kemajuan Kota Surabaya terutama dalam bidang ekonomi menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Akibatnya, jumlah penduduk yang tinggal di wilayah Kota Surabaya semakin banyak.

Keberadaan kelompok LGBT semakin lama semakin tampak di lingkungan masyarakat di Jawa Timur khususnya Surabaya. Sebuah hal yang ironis sekali mengingat Surabaya merupakan kota yang terkenal dengan semangat jiwa anak mudanya. Banyaknya perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Surabaya menunjukkan keberagamannya anak muda yang menempuh pendidikan di sana. Keberagaman tersebut ditinjau dari asal daerah mahasiswa yang berjumlah hampir lebih besar daripada mahasiswa yang berasal dari Jawa Timur sendiri atau lebih sering disebut sebagai pendatang, latar belakang keluarga, usia, motivasi belajar, bahkan orientasi seksual juga ikut serta dalam keberagaman tersebut. Surabaya yang menjadi ibukota provinsi sekaligus dikenal sebagai kota metropolis selain Jakarta memiliki penilaian khusus dilihat dari sisi adanya ruang – ruang khusus bagi masyarakat yang memiliki sebuah kelompok – kelompok yang memiliki kedekatan, kesamaan orientasi seksual dan menyangkut ketertarikan antar personal. Sebuah informasi yang cukup mencengangkan bahwa salah satu LSM yang didirikan untuk kaum gay yaitu Gaya Nusantara memperkirakan sekitar 260.000 dari enam juta penduduk Jawa Timur adalah homo. Bahkan

Surabaya merupakan daerah yang mempunyai populasi gay terbesar di Indonesia.⁶

Dari beberapa uraian diatas bisa kita bayangkan betapa Surabaya menjadi daya tarik bagi warga lainnya untuk urban ke kota Metropolitan ke 2 setelah Jakarta. Semakin maju kota Surabaya, membuat semakin bermacam-macam penduduk yang berada di Kota Surabaya. Seperti halnya keberadaan kelompok-kelompok Minoritas seperti; kelompok minoritas Tiong Hoa, Arab, ataupun kelompok Minoritas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender).

B. Profil Organisasi

1. Profil Gaya Nusantara

Gaya Nusantara adalah pelopor organisasi gay di Indonesia yang terbuka dan bangga akan jati dirinya serta tidak mempermasalahkan keragaman seks, gender dan seksualitas serta latar belakang lainnya.⁷

a. Visi

Terwujudnya tatanan sosial yang menerima dan menghargai hak-hak asasi manusia, Keragaman seks, gender, seksualitas dan kesejahteraan seksual, atas dasar kerelawanan, demokrasi, anti kekerasan, independensi serta keterbukaan.

⁶ http://albertindanis.blogspot.com/2011/08/studi-fenomenologi-interaksi-kaum-gay_2709.html akses 14 Juli 2013 18:17

⁷ <http://www.gayanusantara.or.id/> akses 14 Juli 2013 18:17

b. Misi

- 1) Melakukan pendidikan dan penyadaran publik
- 2) Menyediakan dan mengembangkan media untuk saling berkomunikasi, berdiskusi, dan berjaringan
- 3) Menyediakan pelayanan untuk kesejahteraan seksual yang optimal, aktualisasi diri dan kebebasan berekspresi
- 4) Membangun jaringan, memperkuat organisasi, dan bekerjasama dengan organisasi yang mempunyai tujuan serupa.

c. Nilai-nilai Dasar

- 1) Kerelawanan: bekerja tanpa pamrih yang mengutamakan kepentingan dan tujuan organisasi visi dan misi
- 2) Demokrasi: pengambilan keputusan yang terbuka, partisipatif dengan kemampuan menerima perbedaan dan kesetaraan.
- 3) Anti kekerasan: lebih mengutamakan dialog untuk mencapai kesepakatan dan berupaya sekuat mungkin untuk menghindari kekerasan secara fisik, psikis, sosial dan budaya sebagai bagian dari upaya penegakan HAM dan memerangi ketidakadilan.
- 4) Independensi: kebebasan untuk menentukan arah dan tujuan organisasi, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pihak lain.

5) Keterbukaan: konsistensi dan jujur dalam memberikan fakat dan informasi yang sesungguhnya sejauh untuk kepentingan dan tujuan organisasi seras visi dan misi.⁸

d. Struktur Organisasi

Ketua : Rafael H. Da Costa

Sekretaris 1 : Poedjiati Tan

Sekretaris 2 : Hadi Purwanto

Bendahara : Sardjono Sigit

Kepala Divisi Penelitian dan Pendidikan : Ahmad Zainul Hamdi

Kepala Divisi HAM Politik Penyadaran Publik (HP3) : Khanis
Suvianita

Kepala Divisi Media : Nur Agustina

Kepala Divisi PKKS : Suhartono.⁹

2. Profil Perwakos

Perwakos merupakan sebuah forum yang mana di adakan oleh para waria di Surabaya, dan anggotanya adalah para waria yang tergolong dari berbagai daerah di Jawa Timur. Surabaya merupakan kota metropolitan yang sarat cerita tentang waria dan komunitasnya berawal sejak tahun 1970-an. Dimana pada era itu waria Surabaya membentuk suatu wadah organisasi PERWAKOS (Persatuan Waria Kota Surabaya) yang merupakan sebuah wadah perkumpulan aspirasi para waria, dalam organisasi tersebut memiliki banyak manfaat yang positif terhadap kaum

⁸ <http://www.gayanusantara.or.id/> akses 14 Juni 2013 18:17

⁹ <http://www.gayanusantara.or.id/>

waria, seperti aspirasi para waria agar dapat disejajarkan dengan wanita dan pria yang pada umumnya persoalan-persoalan seperti KTP, pernikahan maupun pencegahan penyakit HIV/AIDS yang kerap muncul karena perilaku seks bebas maupun narkoba yang selalu ditujukan pada kaum waria, homoseksual maupun pekerja seks komersial (PSK). Pada saat ini PERWAKOS juga melakukan upaya-upaya untuk selalu menjaga keselamatan dan juga kesehatan bagi kaum waria terutama masalah seputar penyakit AID yang rentan di alami oleh waria, terutama bagi waria yang bekerja dalam sektor prostitusi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh LSM perwakos yang mana telah bekerjasama dengan rumah sakit maupun puskesmas yang letaknya menyebar di Surabaya untuk menangani berbagai permasalahan waria dalam bidang kesehatan .¹⁰

a. Visi

Perwakos (Persatuan Waria Kota Surabaya) mencita-citakan komunitas waria, *transseksual* yang mampu melakukan pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan terhadap Infeksi Seksual Menular (IMS) dan HIV/AIDS dengan pendekatan kesehatan dan kesejahteraan seksual dan reproduksi serta hak asasi manusia (HAM) waria dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara.

b. Misi

- 1) Memperkuat dan memobilisasi organisasi dan komunitas waria sehingga dapat melaksanakan program pencegahan, perawatan,

¹⁰ Septa Nurlaifah Baisaroh, *Konstruksi Gaya Hidup Kaum Waria(studi kasus kaum waria di daerah Aloha Gedangan Surabaya*, (skripsi) hal. 48

dukungan serta pengobatan terhadap IMS dan HIV/AIDS dalam kesehatan, kesejahteraan serta hak seksual dan reproduksi.

- 2) Membangun, mengembangkan dan memelihara komunikasi dan kerja sama yang baik antara organisasi-organisasi dan komunitas waria manapun dengan lembaga lainnya yang berkepentingan untuk mencapai dan terpenuhinya kesehatan, kesejahteraan serta hak asasi manusia di negara Indonesia, khususnya Kota Surabaya.
- 3) Mengkoordinasi kerja advokasi menuju tercapainya kesehatan dan kesejahteraan kehidupan kaum waria dalam berkehidupan bermasyarakat.¹¹
- 4) Struktur Organisasi

Ketua Dewan Pembina : Irma Subeshi

Ketua : Yayuk Junaidi

Bendahara : Siska

Sekretaris : Irma.¹²

C. Eksistensi Kelompok LGBT Surabaya

Keberadaan kelompok LGBT memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat perkotaan. Tidak sedikit tempat disudut kota selalu diramaikan hingar bingar kehidupan malam yang glamour, dan di tempat itulah kelompok LGBT dapat kita temui termasuk kota Surabaya. Keberadaan kelompok LGBT di tengah-tengah masyarakat menuai kontroversi. Hal ini dikarenakan

¹¹ *Ibid.*, hal. 49

¹² Wawancara dengan Irma Subehi 21 Juni 2013 12:03

kelompok LGBT ini dianggap sebagai kelompok minoritas yang memiliki penyimpangan orientasi seksual. Ironisnya, keberadaan LGBT ini selain mendapat perlakuan yang diskriminasi dari masyarakat namun juga banyak yang menjadi objek penghinaan bahkan kekerasan yang dianggap bertentangan dengan budaya dan agama. Banyaknya kekerasan yang diterima mengakibatkan mereka pergi dan berkumpul dengan sesama.

Ditengah masyarakat dengan budaya jawa dan adat ketimuran. Kelompok LGBT ini semakin merasa dipinggirkan oleh masyarakat. Keberadaan kelompok LGBT dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang berkembang di Indonesia. Penyimpangan seksual yang mereka miliki dianggap sebagai dampak buruk globalisasi budaya barat yang melegalkan kelompok ini dan dikhawatirkan akan mempengaruhi masyarakat lainnya. Tidak sedikit masyarakat yang memiliki stigma negatif terhadap kelompok ini dan tidak berfikir bahwa munculnya orientasi seksual yang menyimpang ini, tidak sekedar keinginan dari individu mereka sendiri, namun juga merupakan ebntukan dari kontruksi sosial yang mempengaruhi kondisi psikologis dari mereka.¹³ Untuk memperoleh hak-haknya kelompok LGBT di kota Surabaya membentuk sebuah perkumpulan/organasasi dimana mereka mempunyai tujuan yang sama serta menjadikan organisasi tersebut sebagai wadah dan aspirasi dari kelompok LGBT. Karena diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat lain membuat kelompok LGBT akan merasa lebih nyaman jika dengan sesamanya. Kelompok LGBT

¹³ <http://aprilfullmoon.blogspot.com/2009/10/upaya-kaum-lgbt-lesbian-gay-biseksual.html> akses 10 juli 2013 12:36 WIB

mulai menunjukkan jati dirinya bahwa mereka juga layak untuk memperoleh hak yang sama seperti halnya warga negara Indonesia yang lain.

Di Surabaya terdapat sebuah organisasi yang dinamakan Gaya Nusantara dan perwakos kedua organisasi tersebut sangat mempunyai peranan penting terhadap eksistensi kelompok LGBT di Surabaya selama ini. Gaya Nusantara lebih dominan terhadap gay, tetapi tidak di pungkiri bahwa anggota Gaya Nusantara terdapat seorang Transgender, Lesbian dan Bisesksual. Beberapa kegiatan yang mendukung keberadaan kelompok LGBT seperti halnya peringatan hari AIDS sedunia, menggelar diskusi dan pemutaran film Queerduck dan Pariah, tepat pada peringatan IDAHOT 17 Mei 2013. Beberapa kegiatan yang mereka lakukan itu salah satu cara menunjukkan eksistensi mereka di kota Surabaya.

Indonesia sebagai negara hukum dan penegak HAM, sudah semestinya warga masyarakatnya mendapatkan perlakuan yang layak dan perlindungan sama dalam berbagai kehidupan masyarakat, seperti akses terhadap lapangan pekerjaan, pendidikan, dan jaminan keamanan sosial yang lain. Namun, pemerintahpun dalam hal ini belum dapat berbuat banyak terhadap kelompok LGBT. Dalam penelitian ini, penulis bukan sebagai pihak yang pro LGTB atau yang anti LGBT, karena penulis menyadari bahwa tidak semua hak dapat diberikan kepada setiap orang. Namun, yang menjadi keprihatinan penulis dalam melihat kelompok LGBT ini juga merupakan warga negara Indonesia yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama oleh pemerintah, namun seringkali masyarakat lain dan pemerintah lupa bahwa kelompok ini juga

merupakan bagian dari warga negara. Dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan hak-hak asasi manusia.

D. Ruang Bagi Kelompok Minoritas LGBT di Negara Demokrasi

Kalau melihat ketentuan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dijelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab pemerintah. Dan itupun meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan negara dan bidang lain.

Disatu sisi pemerintah terlihat getol ingin menegakkan hak-hak manusia. Tapi dalam waktu bersamaan pemerintah membuat kebijakan-kebijakan diskriminatif. Apabila mencermati sejumlah peraturan ataupun kebijakan pemerintah seringkali bertentangan dengan UUD 1945.¹⁴

Dari pernyataan itu, penulis beranggapan bahwa penegakan hukum yang dilakukan saat ini nyatanya tidak sesuai dengan realitas yang ada dan masih banyak warga negara yang belum merasakan payung hukum di negara Indonesia. Terutama bagi kelompok minoritas seksualitas LGBT. Kelompok LGBT surabaya mengatakan bahwa memang di Surabaya tidak ada (PERDA) peraturan daerah khusus yang mendiskriminasi kelompok LGBT, tetapi tanpa disadari banyak sekali peraturan yang tidak memperbolehkan kelompok LGBT untuk berpartisipasi, hal ini dibenarkan oleh Dina Feblita:

Di Surabaya sendiri memang tidak ada peraturan daerah yang mendiskriminasi terhadap keberadaan LGBT. Tetapi banyak peraturan yang seharusnya berhak, tetapi karena kita seorang lesbian kita dilarang, contoh kecil saja menjadi seorang polisi. Mana mungkin kita diperbolehkan juga terjun di Instansi pemerintahan apabila kita mengakui bahwa kita adalah seorang LGBT.¹⁵

¹⁴ Ibu Khanis Suvianita, Gaya Nusantara, 24 April 2013 11:39 WIB

¹⁵ Dina Feblita 10 September 2013 20:00 WIB

Di Indonesia wacana seksualitas semakin menguat dan terlihat seiring dengan semakin hingar-bingar pertunjukan identitas politik di wilayah publik sebagai efek kelanjutan reformasi. Di sisi lain, tema seksualitas kerap dianggap sekunder dibanding isu-isu lain yang dianggap lebih genting semisal korupsi atau manuver partai politik. bahkan seksualitas baru dianggap kasus, bukan dilihat sebagian dari hak asasi manusia.

Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara populasi muslim di seluruh dunia. Negara ini memiliki lebih dari 250 juta populasi dengan latar belakang agama, budaya, suku dan ras yang beragam. Wacana seksualitas sebenarnya sudah menjadi bagian kebudayaan bangsa Indonesia beratus tahun lamanya dalam praktik kultur masyarakat Indonesia lewat tarian, spiritual, dan lain-lain. Sebut saja tarian kebudayaan Reog Ponorogo di Jawa Timur, yang memperlihatkan relasi dan ekspresi homoseksualitas.¹⁶ Ruang yang dituntut oleh kelompok minoritas seksual ini memberikan suatu guncangan terhadap konstruksi nilai yang sudah ada tentang seksualitas.

Secara umum, manusia memiliki orientasi seksual pada lawan jenis (laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya). Hal ini disebut heteroseksual. Namun ada kondisi dimana sebagian orang tertarik terhadap sesama jenis, laki-laki tertarik kepada laki-laki yang disebut gay, atau perempuan tertarik kepada perempuan yang disebut lesbian. Pada umumnya masyarakat membagi gender di dasarkan pada jenis kelaminnya. Seorang jantan harus lah

¹⁶ <http://www.eroticsindonesia.net> (jaringan Advokasi dan hak penelitian internet perempuan dan seksualitas) akses 12-06-2013

bertingkah laku seperti laki-laki dan begitupun seperti halnya perempuan harus bertingkah laku selayaknya perempuan.

Konstruksi ini telah mengakar dan menjadi *stereotype* bagi masyarakat. Masyarakat akan mengasumsikan bahwa mereka seperti; Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender adalah sebagai penyakit. Karena pada umumnya masyarakat hanya percaya dan mengetahui bahwa orientasi seksual yang benar dimana masing-masing pihak tertarik pada lawan jenis.¹⁷

Menurut penuturan langsung tersebut, beragam stigma yang dilakukan masyarakat itu akan menampakan diskriminasi terhadap kelompok LGBT dan mereka sulit untuk mengungkapkan jati dirinya. Disini penulis melihat bahwa faktor tersebut yang menjadi penghambat bagi kelompok LGBT untuk terbuka dengan orang lain. proses pembukaan diri ini disebut “*coming out*” suatu proses bagi kelompok LGBT untuk mengakui bahwa dirinya adalah homoseksual baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain.

Keterbukaan yang inklusif terhadap kelompok minoritas LGBT dalam sistem demokrasi mampu mewujudkan partisipasi politik kelompok ini dengan mengenal kembali keberagaman seksualitas manusia. tidak hanya dalam sistem demokrasi, sesungguhnya politik perbedaan seksual juga menuntut perubahan dalam tatanan sosial dengan wacana minoritas LGBT sebagai dekonstruksi terhadap heteroseksual normatif. Kelompok ini menuntut adanya penerimaan dari masyarakat dan pemberian ruang bagi keberagaman seksualitas. Dengan terbukanya ruang dalam tatanan sosial, akan menciptakan relasi yang saling menghormati antar sesama, kemudian menghilangkan bentuk diskriminasi sosial. Melalui sistem demokrasi yang

¹⁷ Ibu Khanis Suvianita, Gaya Nusantara, 24 April 2013 11:39 WIB

emansipatoris, yang dapat mengakomodir diskursus tentang seksualitas ini memberikan rasa optimis kearah pembebasan. Jika merujuk pada praktek politik Indonesia yang masih dibayangi oleh doktrin keagamaan dan kebenaran esensial (kurang jelas) terhadap seksualitas yang ilusif kelompok minoritas LGBT menjadi tersingkir tanpa perlawanan.¹⁸ Hal ini pun dialami oleh kelompok LGBT di Surabaya.

Stigma negatif dari masyarakat yang menganggap kelompok LGBT tidak bermoral, menyimpang, gila, sesat dan lain sebagainya seperti memberi pembenaran pada tindakan dikriminasi.¹⁹

Dari pernyataan diatas pada akhirnya demokrasi hanya menjadi segenap ruang wacana, subyek sosial maupun pergerakan arus politik, berkompetisi, menghapus kemungkinan hegemoni ideologi tertentu. Tuntutan akan ruang dalam demokrasi terhadap kelompok minoritas seksual adalah upaya untuk mempromosikan seksualitas sebagai bahasa politik sebagai kepentingan bersama. Demokrasi sebagai ruang yang menampung keberagaman ideologi. Dimana kelompok minoritas menuntut tempat selayaknya manusia pada dasarnya. Pernyataan itu pun dibenarkan oleh mbk Irma selaku ketua dari PERWAKOS.

Dalam berekspresi sering saja kita mengalami bentuk diskriminasi, ruang gerak kita sebagai layaknya manusia seperti terpotong, PERWAKOS sendiri boleh mengadakan kegiatan ya hanya di gedung Ludruk Surabaya, dan ditempat lainnya kita dilarang. Meskipun bentuk kegiatan kami sebenarnya bertujuan baik.²⁰

¹⁸ Windy Warna Irawan, Negara.....hal 72

¹⁹ Sardjono Sigit , Gaya Nusantara, 12 Juli 2013 12: 34 WIB

²⁰ Irma Subechi, Ketua Dewan Pembina/sekertaris PERWAKOS (Persatuan Waria Kota Surabaya) 21 Juni 2013 15:02 WIB

Dilihat dari apa yang dialami kelompok LGTB di Surabaya, mereka selama ini masih belum memperoleh ruang gerak seperti halnya warga Surabaya lainnya. Mereka menganggap bahwa kelompok minoritas LGBT merupakan bagian dari masyarakat, dan berhak untuk mengharapkan bahwa situasi dan permintaan mereka dipertimbangkan dalam membuat kebijakan publik. Ini hanya dapat dicapai dalam perjuangan yang lebih luas, seperti misalnya perjuangan untuk perdagangan dan pembangunan yang adil, hak-hak ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Hak asasi manusia LGBT mungkin tampaknya seperti hanya impian di wilayah dunia dimana pembebasan diri dari kemiskinan dan kekerasan merupakan agenda sehari-hari.

E. Realitas Jaminan Hak Asasi Manusia Kelompok LGBT Kota Surabaya

Perbedaan antar manusia itu hal wajar. Tetapi setiap manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai hak dan martabat yang sama. Penolakan untuk menerima dan menghormati perbedaan-perbedaan ini berarti penindasan atas orang-orang yang mempunyai orientasi seksual Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) tetap menjadi realitas sehari-hari di banyak wilayah dunia. Meski diskriminasi dan kekerasan terhadap LGBT semakin memburuk, namun semakin banyak juga individu dan kelompok yang berani memperjuangkan hak-hak asasi LGBT. Pada dasarnya perjuangan mereka hanya menuntut keadilan, seperti halnya hak asasi manusia menjadikan mereka selanjutnya manusia tanpa diskriminasi dan pengecualian apapun di kota Surabaya.

Keberadaan LGBT memang sangatlah banyak di Surabaya. Tetapi mereka selama ini masih di nilai oleh masyarakat sebagai suatu hal yang negatif dan menyimpang. Jadi banyak juga timbul tindakan-tindakan yang mendiskriminasi kelompok mereka.²¹

Seolah disini pemerintah memberikan kebenaran atas Stigma negatif yang sudah melekat di masyarakat Surabaya tentang keberadaan LGBT. Hal ini juga di dukung oleh sifat pemerintah kota yang tidak peduli terhadap keberadaan kelompok LGBT di Surabaya selama ini.

Melihat Surabaya sebagai kota metropolitan 10% dari jumlah penduduknya bisa dikategorikan sebagai kelompok LGBT.²² Tetapi karena masih terdapat penolakan mereka hanya bisa menunjukkan jati dirinya ditempat-tempat tertentu atau pada saat mereka berada bersama komunitas sejenisnya. Keberadaan yang lumayan banyak juga tidak akan memberikan kepastian hukum bagi kelompok LGBT tersebut.

Pemerintah sendiri seolah ragu/sangsi apakah mereka juga memperoleh jaminan hak yang sama kepada kelompok minoritas LGBT. Pemerintah hanya bisa memberi jaminan bahwa kelompok LGBT itu memang di berikan perhatian khusus dalam bidang penanggulangan HAIV/AIDS tapi untuk jaminan lain mereka mengatakan selalu mengikuti aturan pusat. Pernyataan itu dibenarkan oleh lembaga hukum kota Surabaya.

Kami memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas LGBT itu dalam bidang kesehatan untuk penyegahan penyakit HIV/AIDS. Tetapi dalam bidang lain kami masih belum bisa memberikan perlindungan karena melihat kelompok minoritas LGBT tersebut masih dianggap mengganggu oleh masyarakat lain.²³

²¹ Maskur SH, Kasubag Administrasi dan Dokumentasi Hukum, 12 juli 2013 09:31

²² Andika Hadinata/ Andreas, Gaya Nusantara, 11 Juli 2013 . 12:42 WIB

²³ Maskur SH, Kasubag Administrasi dan Dokumentasi Hukum, 12 juli 2013 09:31

Jika melihat dari realitas tersebut, jaminan selayaknya manusia pada umumnya masih belum bisa dirasakan oleh kelompok LGBT. Pada kenyataannya jaminan yang diperoleh oleh kelompok minoritas LGBT selama ini tidak di lindungi karena di kota Surabaya keberadaan mereka masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak biasa, masih meresahkan masyarakat meskipun keberadaan kelompok LGBT lumayan banyak. Hal itu pun di benarkan oleh Irma Subechi yang mengatakan bahwa:

Sangatlah sulit mencari keadilan, rasa nyaman, mungkin kita dianggap sebagai makhluk aneh yang tidak bermoral. Bagi saya hukum di negara ini ya hanya sebatas nama saja.²⁴

Padahal tindakan seperti itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM . Sudah sangat jelas bahwa hak asasi manusia (*human rights*) yang kita kenal pada mulanya adalah hukum kodrati. Pandangan Thomistik mengenai hukum kodrati adalah mempostulatkan bahwa hukum kodrati ini merupakan bagian dari hukum tuhan yang sempurna yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. Untuk memenuhi hak setiap manusia pasti peran aparatur negara sangatlah penting. Tapi pada kenyataannya pemerintah Surabaya belum melakukan tindakan yang konkrit terhadap jaminan kelompok LGBT Surabaya.

Belum ada peraturan daerah yang membahas tentang jaminan kelompok LGBT. Dan pemerintah sendiri belum mempunyai rencana untuk membahas tentang jaminan terhadap kelompok LGBT.²⁵

Melihat selama ini belum ada peraturan daerah yang membahas tentang keberadaan kelompok LGBT, yang membuat tindakan-tindakan diskriminasi

²⁴ Irma Subechi, Ketua Dewan Pembina/sekertaris PERWAKOS (Persatuan Waria Kota Surabaya) 21 Juni 2013 15:02 WIB

²⁵ Maskur SH, Kasubag Administrasi dan Dokumentasi Hukum, 12 Juli 2013 09:31

seakan berkembang pesat. Bahkan pelaku sendiri dari aparaturnegara. Pemerintah Surabaya seakan kurang bersemangat mengeluarkan kelompok LGBT ini dari penderitaan mereka. Kubangan diskriminasi dan intoleransi masih terus menjadi kontruksi sosial dan pandangan dominan masyarakat terhadap keberdaan mereka. Pemerintah mungkin khawatir akan berhadapan dengan konstruksi sosial pandangan heteroseksual yang mendominasi pola pikir masyarakat. Biasanya masyarakat melakukan stigmatisasi terhadap mereka dengan menggunakan justifikasi doktrin dan teks-teks suci keagamaan. Tindakan kekerasan yang di lakukan masyarakat seakan dibiarkan dan mungkin dibenarkan oleh pemerintah. Meskipun pemerintah kota Surabaya dengan tegas mengatakan bahwa apa yang dilakukan selama ini untuk masyarakat banyak.

Berbicara mengenai hak asasi manusia, mungkin setiap warga negara berhak menuntut hal tersebut, tanpa terkecuali kelompok LGBT. Peraturan daerah kota Surabaya selama ini tidak ada yang mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu semua bertujuan untuk keadilan bersama.²⁶

Dari pernyataan diatas penulis melihat bahwa apa yang diungkapkan pemerintah tidak sesuai dengan realitas yang penulis lihat. Peraturan daerah mungkin tidak mendiskriminasi, tetapi pelaku atau instansi dari pemerintah sendiri malah menunjukkan tindakan diskriminasi dan pelanggaran HAM. Contohnya saja seperti yang diungkapkan oleh salah satu Waria Irma Subechi. Disni pemerintah kota Surabaya masih belum bisa memberikan jaminan terhadap keberdaan kelompok minoritas seksualitas LGBT. Apa yang dilakukan pemerintah hanya bertujuan untuk kenyamanan masyarakat

²⁶ *Ibid.*,

banyak tanpa melihat bahwa terkadang tindakan yang dilakukan oleh aparaturnegara melanggar hak asasi manusia kelompok tertentu.

Sebagai kelompok non heteroseksual kelompok LGBT memperoleh keadilan di negara demokrasi seperti Indonesia itu masih sangat sulit. Stigma negatif yang selalu melekat pada diri kelompok minoritas LGBT membuat masyarakat enggan menerima keberadaannya. Pemerintah sendiri seperti tidak bisa memberikan jaminan yang pasti kepada kelompok non heteroseksual tersebut.

Sebenarnya kelompok kita bukan tidak ada jaminan tetapi tidak ada pengakuan dari pemerintah, dulu kita pernah bikin kegiatan dan dipaksa bubar oleh FPI. pada saat itu kita bisa dialog kalau kita punya dasar yakni hak asasi manusia tetapi mereka tidak mau menerima alasan kita, padahal kita sadar bahwa kita punya hak sebagai warga negara tetapi saat kita dilanggar kita tidak punya perlindungan, seakan payung hukum itu tidak melindungi kita.²⁷

Tindakan kekerasan yang dilakukan masyarakat terhadap keberadaan kelompok LGBT merupakan salah satu contoh kecil pelanggaran HAM. Karena tidak ada jaminan dan peraturan daerah terhadap keberadaan mereka yang membuat seakan tindakan tersebut disahkan oleh pemerintah.

Bagi kelompok LGBT Surabaya keadilan merupakan suatu pilihan utama di negara demokrasi. Dimana setiap warga negara berhak memperoleh jaminan hidup, keadilan dan hak dasar manusia. Menurut Rawls bahwa keadilan merupakan suatu cara pendistribusian hak, kewajiban, manfaat dan beban di antara individu-individu di dalam masyarakat. Jika keberadaan mereka tidak terjamin bagaimana keadilan itu akan berpihak kepada kelompok LGBT. Tetapi pemerintah seolah tidak menyadari bahwa manusia

²⁷ Sardjono Sigit, Gaya Nusantara, 11 Juli 2013 13:11WIB

yang hidup di negara kita bukan hanya seorang heteroseksual tetapi juga ada homoseksual dan lain-lain.

Melihat kenyataan yang seperti ini menunjukkan bahwa keberadaan minoritas seksual LGBT masih belum memperoleh jaminan dari pemerintah Indonesia sendiri. Padahal bisa dikatakan pemerintah merupakan satu-satunya penanggung jawab hak asasi manusia adalah bahwa hak asasi manusia yang sejati bersandar pada pertimbangan-pertimbangan normatif yang sangat kuat yang memerintahkan agar umat manusia diperlakukan dalam cara-cara tertentu dan tidak dalam cara-cara lain.

Hak memperoleh pekerjaan, kebebasan berekspresi, karena kelompok LGBT tidak memperoleh kebebasan selayaknya masyarakat heteroseksual, itu menyebabkan kelompok LGBT atau seperti halnya transgender itu lebih suka hidup berkelompok-kelompok.²⁸

Jika apa yang kelompok LGBT belum dapatkan keberadaan organisasi minoritas akan tetap ada dan bahkan akan semakin bertambah. Ini merupakan sebuah kirtikan di masa kepemimpinan Bu Risma dalam memimpin kota Surabaya masih terdapat kekurangan yang sangat dirasakan oleh kelompok LGBT, bagaimana hak dasar mereka masih belum terpenuhi, seperti hak rasa aman, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh keadilan. Jika hak-hak dasar ini saja belum terpenuhi bagaimana pasal-pasal yang ada dalam UU No 39 tentang hak asasi manusia dapat berjalan seperti apa yang seharusnya ditegakkan.

²⁸ Irma Subechi

F. Upaya Kelompok LGBT dalam Memperoleh Hak Politik

Penerimaan negara dan sebagian besar masyarakat terhadap keragaman identitas gender serta seksualitas masih sangat memprihatinkan. Diranah hukum dan kebijakan publik masih terjadi ketimpangan dan ketidakadilan atas perlindungan serta pemenuhan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi, terutama bagi kelompok muda, perempuan dan kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Sangat disadari perjuangan untuk membela hak-hak kelompok LGBT di Surabaya sangatlah berat, stigma dan diskriminasi semakin kuat dengan kondisi dimana tafsir agama dan budaya patriarki yang memposisikan kelompok ini sebagai kelompok menyimpang.

Di satu sisi pergerakan kelompok minoritas seksual LGBT merupakan suatu pergerakan politik perbedaan seksual. Politik perbedaan seksual LGBT ini menjadi tantangan terhadap peran gender dalam norma heteroseksual yang diinstitusikan. Politik ini adalah suatu penolakan untuk hidup dalam batasan norma heteroseksual tersebut. Akan tetapi di sisi lain selama ini, tuntutan yang diajukan oleh kelompok non heteroseksual untuk diperlakukan sama atau setara dengan heteroseksual, bukan untuk menentanginya. Tujuannya untuk memperoleh hak istimewa seperti yang didapatkan kelompok heteroseksual.

Dalam prespektif HAM, memiliki orientasi berbeda hak asasi manusia, ia tidak dapat dikurangi oleh keadaan apapun, konstitusi, *Universal Declaration of Human Right*, UU HAM, dan berbagai instrumen yang

menjamin pemenuhan HAM telah diharuskan di Indonesia. Harus digunakan penyelenggara negara untuk membentuk pemenuhan hak-hak dasar, termasuk kelompok LGBT. Perubahan sosial dan perkembangan demokrasi di Indonesia juga memberikan ruang bagi orang-orang dan organisasi LGBT mulai membicarakan dan menyerukan hak-hak mereka. Walaupun sudah ada instrumen HAM yang bisa digunakan untuk melindungi kelompok LGBT tetapi negara ini telah abai melindungi warga negaranya. Kelompok LGBT yang berkegiatan di publik tidak mendapatkan perlindungan. Keamanan dan perlindungan orang LGBT bukan menjadi bagian yang diperhatikan yang diperhatikan oleh negara.

John Locke dalam teori hak kodrati berargumentasi bahwa semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara.²⁹ Hal ini juga berlaku bagi kelompok LGBT, bahwa mereka mempunyai kebebasan atas apa yang ada dalam dirinya sendiri dan tidak dapat diganggu oleh siapapun termasuk negara.

Dan hal ini dipertegas oleh Rousseau bahwa hukum kodrati tidak menciptakan hak-hak kodrati individu, melainkan menganugerahi kedaulatan yang tidak bisa dicabut pada para warga negara sebagai satu kesatuan. Jadi, setiap hak yang diturunkan dari hukum kodrati aka ada pada rakyat sebagai suatu kolektivitas dan dapat diidentifikasi dengan mengacu pada

²⁹ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994) hal.

“kehendak umum”.³⁰ Jika hukum kodrati yang menganugerahi setiap warga negara sebagai suatu kesatuan, dan memperoleh hak yang sama tanpa terkecuali. maka sebagai warga negara Indonesia kelompok LGBT juga berhak memperoleh keadilan dan kebebasan serta hak-hak dasar seperti halnya yang diperoleh oleh kelompok heteroseksual pada umumnya.

Selama ini kelompok LGBT di Surabaya membentuk sebuah kelompok-kelompok atau organisasi seperti halnya Gaya Nusantara atau PERWAKOS sebagai wadah untuk menyuarakan hak-hak yang seharusnya kelompok LGBT terima.

Bagi kami (kelompok LGBT) membentuk sebuah organisasi adalah bagian dari politik kita, menyuarakan apa yang menjadi hak kelompok minoritas seksualitas LGBT merupakan bagian dari politik politik.³¹

Karena penerimaan dan jaminan dari pemerintah sendiri yang belum diberikan kepada kelompok LGBT. Membuat organisasi-organisasi kelompok minoritas seksual LGBT akan terus bersuara untuk menyuarakan keadilan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia selama ini.

Kelompok LGBT Surabaya seperti Gaya Nusantara dan PERWAKOS melakukan upaya-upaya yang sangat keras demi keberadaannya di terima oleh masyarakat dan pemerintah sebagai berikut:

1. Masyarakat

Kelompok LGBT kota Surabaya baik Gaya Nusantara maupun PERWAKOS selama ini melakukan usaha-usaha guna menghilangkan stigma negatif dari masyarakat terhadap keberadaan kelompok LGBT.

³⁰ *Ibid.*, hal 38

³¹ Ibu Khanis Suvianita, Gaya Nusantara, 24 April 2013 11:39 WIB

Kita mengedukasi teman-teman atau jaringan masyarakat bahwa hak seksualitas. Bahwa orang lain tidak bisa mengintervensi orang lain. Banyak dari teman-teman tidak sadar terhadap itu, dia lebih memilih mendengarkan kata orang lain.³²

Pengakuan yang diberikan oleh anggota Andreas, agar upaya yang mereka lakukan bertujuan menyadarkan masyarakat dan tahu bahwa keberagaman seksualitas di Indonesia itu ada. Sebenarnya seksualitas itu tidak hanya terdiri dari kaum heteroseksual yang pada umumnya masyarakat Surabaya ketahui, tapi terdapat beberapa macam seksualitas seperti halnya homoseksual. Usaha ini agar mengurangi tindakan diskriminasi yang dilakukan masyarakat terhadap kelompok LGBT. Pada dasarnya tindakan-tindakan diskriminasi yang dilakukan masyarakat selama timbul karena ketidaktahuan masyarakat terhadap apa yang dinamakan LGBT. Maka dari itu kelompok-kelompok LGBT Surabaya perlu melakukan edukasi terhadap masyarakat.

Kita pernah memberikan seminar terhadap macam-macam seksualitas itu pada mahasiswa Unair. Ternyata respon mereka sangat baik.³³

Respon yang baik yang diterima saat itu, merupakan langkah awal bagi kelompok LGBT untuk melakukan upaya-upaya agar memperoleh hak-hak yang selama ini terdiskriminasi.

2. Pemerintah

Demi memperjuangkan hak-haknya jalan apapun akan ditempuh usaha ini dilakukan oleh PERWAKOS yang diketuai oleh mbak Irma Subehi

³² Andika Hadinata/ Andreas , Gaya Nusantara, 11 Juli 2013 . 12:42 WIB

³³ *Ibid.*,

Kita melakukan advokasi ke pemerintah dalam bidang kesehatan dan itu berbuah positif. Dan mencerdaskan pemerintah bahwa ada yang namanya gender dan seksualitas.³⁴

Hasil dari usaha yang dilakukan PERWAKOS merupakan sekumpulan upaya yang dilakukan kelompok LGBT di Surabaya. Sejah banyak usaha ini yang dilakukan kelompok LGBT untuk memperoleh pengakuan pemerintah kota Surabaya. Agar mendapatkan jaminan yang seharusnya mereka dapatkan. Mereka melakukan beberapa usaha guna memperjuangkan HAM LGBT. Dan hal ini sudah dilakukan baik ditingkat lokal maupun Intenasional. Seperti sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2012 usaha audiensi yang dilakukan kelompok waria dan gay dengan Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kota Surabaya
- b. Tahun 2012 membuat UPR dan ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights/ Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik*) *shadow report* yang langsung dikirimkan ke PBB
- c. Dan juga melakukan lobi-lobi untuk perbaikan kondisi HAM LGBT di Indonesia dll .³⁵

Penulis melihat bahwa Tindakan-tindakan yang mereka lakukan merupakan upaya untuk menuntut keadilan, kesetaraan dan merupakan bentuk tuntutan hak-hak asasi manusia. menuntut keadilan yang layak di perjuangkan bagi kelompok minoritas LGB. Pada masa pemerintahan bu Risma ini kelompok LGBT mengatakan:

³⁴ Irma Subechi, Ketua Dewan Pembina/Sekretaris PERWAKOS (Persatuan Waria Kota Surabaya) 21 Juni 2013 15:00 WIB

³⁵ Ibu Khanis Suvianita, Gaya Nusantara, 24 April 2013 11:39 WIB

Kalau yang saya lihat bu Risma itu tidak mendiskriminasi dan tidak juga pro terhadap kelompok minoritas LGBT.³⁶

Kekurangan pada pemerintahan bu Risma sendiri tidak adanya konsisten terhadap jaminan keberadaan kelompok LGBT. Karena pemerintah tidak mau melakukan hal ekstrim terhadap kelompok minoritas LGBT. Padahal selama kelompok LGBT merupakan kelompok minoritas yang sering memperoleh diskriminasi, baik dari *state actor* maupun *non state actor*. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan yang kongkrit, selamanya kelompok LGBT akan mendapatkan tindakan diskriminasi. Banyaknya pelanggaran tersebut membuat kelompok LGBT berinisiatif untuk mengumpulkan kasus-kasus tersebut sebagai barang bukti pelaporan mereka ke KOMNAS HAM. Apabila pemerintah tidak melakukan tindakan maka mereka sendiri yang akan melakukan upaya guna memperoleh hak-hak asasi manusia. Pelanggaran tersebut mereka ajukan ke pemerintah atau khususnya KOMNAS HAM, dan terakhir ini kelompok LGBT mencoba lewat jalur internasional seperti PBB karena negara-negara PBB sendiri sekarang sudah mulai terbuka dan menerima dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan di wilayah regional sendiri kelompok LGBT masih melakukan dialog-dialog kepada lembaga-lembaga yang terkait bahwa sesungguhnya mereka mempunyai hak yang sama selayaknya kelompok heteroseksual. Meskipun pemerintah juga tidak bisa memberi jaminan bagaimana proses selanjutnya.

³⁶ Irma Subechi, Ketua Dewan Pembina/Sekretaris PERWAKOS (Persatuan Waria Kota Surabaya) 21 Juni 2013 15:02 WIB

Pernyataan tersebut di benarkan oleh Andreas selaku anggota Gaya Nusantara.

Pada dasarnya tujuan kita adalah ingin bersuara, jika kita tidak bisa bersuara di negeri sendiri kita bersuara di luar, yakni di tingkatan Internasional seperti PBB. Kita mngumpulkan organisasi-organisasi LGBT di Indonesia, apa sih yang sudah terjadi selama ini dan belum mencuat ke pemerintah. Setelah itu kita godok dan kita persentasikan ke United Nations (perserikatan Bangsa-bangsa). Dan kemaren pemerintah dan UN itu sempat terjadi perdebatan bagaimana kasus-kasus ini bisa terjadi dan pemerintah sendiri itu tidak tau.³⁷

Menurut teori Queer kelompok LGBT berupaya mendestabilisasi suatu identitas yang sudah fiks menjadi identitas yang cair dan lebih inklusif. Teori ini tidak hanya memperjuangkan toleransi dan kesetaraan terhadap beragam seksualitas tetapi sebagai tandingan terhadap norma heteroseksual. Disini juga bisa dilihat dari apa yang dilakukan Gaya Nusantara melakukan program pemantauan dan pendokumentasian HAM LGBT, dan bagi mereka ini penting dilakukan. Program tersebut dilakukan guna memperoleh keadilan dan kesetaraan terhadap kelompok LGBT di Surabaya. Hasil pendokumentasian ini menjadi bukti adanya fakta-fakta kekerasan dan penyiksaan yang terjadi kepada kelompok LGBT di berbagai tempat di Indonesia. Diharapkan hasil dari dokumentasi berguna untuk menjelaskan keadaan real orang-orang LGBT di Indonesia. Di samping itu juga menjadi wadah bagi LGBT untuk mempunyai hak untuk hidup aman, dilindungi dan dapat mengekspresikan dirinya tanpa terpenahi rasa takut. Dalam Laporan situasi HAM kelompok LGBT di Indonesia juga melalui metodologi :

³⁷ Andika Hadinata/ Andreas (Gay), Gaya Nusantara, 11 Juli 2013 . 12:42 WIB

a. Berbasis kejadian

Adapun kategori fakta kekerasan yang didokumentasikan LGBT sebagai berikut;

- 1) Tindakan
- 2) Korban
- 3) Waktu kejadian
- 4) Pelaku
- 5) Intensitas
- 6) Saksi
- 7) Persepsi korban
- 8) Akibat
- 9) Tindakan setelah kejadian
- 10) Hak yang dilanggar
- 11) Sumber informasi
- 12) Validasi data.³⁸

Validasi data diukur oleh investigator dan pendokumentasi kasus untuk mengukur validitas fakta kekerasan yang dialami oleh korban.

b. Bentuk narasi kejadian

Form narasi kejadian disini adalah kejadian yang dituliskan secara dan sistematis tentang bagaimana peristiwa kejadian yang dialami oleh korban. Uraian kejadian ini menjelaskan kronologi kejadian dan siapa saja yang terlibat.

³⁸ Andreas, Gaya Nusantara

Salah satu kasus yang masuk dalam dokumentasi adalah kasus dari waria. Waria adalah kelompok yang paling rentan dari kategori LGBT yang ada. menjadi waria berarti berhadapan langsung dengan berbagai penolakan baik dari keluarga maupun publik negara. Waria mengalami berbagai tindakan kekerasan yang langsung baik kekerasan psikis, fisik, ekonomi, sosial dan seksual.

Sekitar pukul 00.30 WIB, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 Juwita sedang nongkrong santai bersama temannya di warung PK 5 yang berada di jalan Diponegoro. Malam itu suasana ramai dan banyak orang yang lagi nongkrong di warung itu. Tiba-tiba ada 13 orang satpol PP yang melakukan razia kemudian Juwita melarikan diri dan tertangkap dengan alasan tidak membawa KTP dan akan dilakukan pembinaan. Ketika lari dan tertangkap petugas mengatakan “mengapa malam-malam ini disini dan lari dasar bencong”

Waktu itu 2 Juni 2012, pukul 23:30 WIB, tiga orang waria (anjeli, meta dan sisil) sedang berada di jalan tiba-tiba datang gerombolan laki-laki dengan jumlah 100 orang dengan menggunakan atribut FPI seperti bendera, baju, bertuliskan FPI, sorban. Mereka meneriakan “Allahu Akbar” pelaku menggunakan sepeda motor. Yang melakukan penyerangan dan pemukulan sekitar 10-20 orang.³⁹

Kasus yang dialami Juwita dan 3 orang waria lainnya merupakan inkonsisten aparaturnegara dalam menegakkan hak asasi manusia. di satu sisi pemerintah seakan getol dengan berusaha menegakkan keadilan tapi di sisi lain aparaturnegara dengan bebas melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

³⁹ Andika Hadinata/ Andreas (Gay), Gaya Nusantara, 11 Juli 2013 . 12:42 WIB

Kasus-kasus yang di dokumentasikan ini berdasarkan laporan dan investigasi yang diterima oleh berbagai lembaga-lembaga LGBT yang bekerja dalam proses pemantauan dan pendokumentasian HAM LGBT di Indonesia. Laporan pemantauan pelanggaran HAM LGBT ini merupakan laporan yang pertama kali di Indonesia dan merupakan kerja keras dan sangat disambut dan di apresiasi oleh kelompok LGBT lainnya. Mengingat kerja advokasi untuk hak-hak LGBT bukan perkara sederhana. Membutuhkan keberanian terutama bagi korban untuk membuka persoalan ini menjadi diskursus publik.

Perjuangan melawan aksi-aksi kekerasan oleh kelompok yang mengklaim diri sebagai mayoritas ini, bagi kelompok LGBT bukan perkara enteng. Sudah telanjang sekali bahwa negara beserta aparatus kekuasaannya melakukan pembiaran dan bahkan menyediakan legitimasi politik dan hukum terhadap tindak kekerasan tersebut. Di samping itu, tidak adanya peran aktif masyarakat dalam melawan aksi kekerasan itu membuat pelakunya merasa seperti mendapat persetujuan. Tentu saja tidak semua tunduk dan takluk terhadap tindak kekerasan itu. Dengan kemampuan yang terbatas, sebagian orang terus bergerilya menggalang usaha melawan tindakan diskriminatif tersebut. Baik melalui aksi-aksi terbuka, konferensi pers bersama, pendidikan-pendidikan publik, hingga penerbitan-penerbitan yang bersifat akademik maupun populer.

3. Politik

Dalam dunia politik keterwakilan kelompok LGBT di pemerintahan mungkin tidak ada, akan tetapi kelompok LGBT tidak tinggal diam sampai sebatas itu.

Selama keberadaan kelompok LGBT belum diakui baik oleh pemerintah atau masyarakat. Selama itu organisasi-organisasi seperti gaya nusantara tetap masih ada. buat apa ada sebuah organisasi jika hak-hak kita sudah terpenuhi.⁴⁰

Keberadaan organisasi-organisasi seperti Gaya Nusantara dan PERWAKOS merupakan bukti eksistensi dan perjuangan kelompok LGBT dalam memperoleh hak politik. Upaya dan tekad mereka dalam membela keberadaan LGBT Surabaya sudah tidak bisa diragukan lagi. Bahkan Gaya Nusantara salah satu organisasi yang ikut andil dalam membela keberadaan minoritas di Indonesia.

Mereka berusaha kelompok LGBT ikut dalam aparatur negara. Sebagai wakil dari kelompok LGBT untuk meyarakan hak-haknya. Pada tahun 2012 kelompok LGBT melakukan tindakan yang mendapat ancaman dari masyarakat yang kontra terhadap kelompok LGBT dengan masuknya Dede Oetomo sebagai calon komisioner KOMNAS HAM.

Bagaimana pak Dede Oetomo mencoba masuk dan mendaftar sebagai anggota KOMNAS HAM. Reaksinya sangat pro dan kontra, dan pada saat itu beliau (Dede Oetomo) sudah sampek tahap terakhir ketika ditahap terakhir dia hanya memperoleh satu suara. Mungkin bagi orang lain bahwa pak dede gagal karena dia tidak menjadi anggota KOMNAS HAM, tapi bagi kami dia berhasil. Pada tahap pertama dia berhasil lolos berarti pemikiran orang kan sudah terbuka. Itu salah satu cara bagaimana kelompok LGBT masuk ke dunia politik, Bahwa orang lain atau panitia melihat pak dede saat

⁴⁰ *Ibid.*,

itu tidak melihat dia sebagai gay tapi melihat bahwa pak dede mempunyai kemampuan seperti halnya calon peserta lainnya.⁴¹

Kelompok LGBT melihat bahwa Dede Oetomo merupakan sosok yang mewakili apa yang bisa kita sebut minoritas, Dede Oetomo sebagai salah satu *founder* dari gaya nusantara tak kenal takut dan lelah untuk membela dirinya dan mereka yang memiliki orientasi seksual yang berbeda, dari terjangan gelombang diskriminasi. Lebih dari itu, ia secara proaktif melakukan aktivitas-aktivitas publik bersama-sama dengan kelompok demokratik lainnya untuk menentang aksi-aksi diskriminasi yang ada. Bahkan beliau mewakili kelompok LGBT untuk memperoleh keadilan dengan mendaftar sebagai calon komisioner Komnas HAM, terbuka jalan baginya agar kaum gay, homoseksual dan transgender bisa diakui eksistensinya sebagai manusia dan dihormati hak asasinya sebagai manusia.

Kelompok LGBT Surabaya pernah mencalonkan Dede Oetomo sebagai anggota DPD tahun 2004.⁴² Upaya yang dilakukan kelompok LGBT dalam memperoleh hak politik mungkin masih mendapat perlawanan dari berbagai pihak. Itupun bisa dilihat dari munculnya nama Dede Oetomo sebagai calon Komisioner Komnas Ham, reaksi keras dilakukan dari berbagai elemen yang mengatakan bahwa “tidak selayaknya anggota KOMNAS HAM seorang gay”. Tapi bagi kelompok non heteroseksual kelompok LGBT untuk mencapai titik tersebut sudah

⁴¹ Andika Hadinata

⁴² Wigke Capri Arti Sp, *Politik Subaltern Pergulatan Identitas Gay* (Yogyakarta: JPP UGM, 2010) hal. 140

sebagai peluang bagi narasi-narasi kecil seperti kelompok minoritas seksual mereka. Dalam konsep hak asasi manusia menegaskan bahwa, hak sudah melekat pada manusia seketika ia dilahirkan. Artinya, semua nilai kemanusiaan, kehormatan, martabat, serta kebebasan telah dimiliki individu seja ia dilahirkan. Akan tetapi, kenikmatan-kenikmatan ini hanya dapat dinikmati bergantung pada sistem sosial yang mengaturnya. Sistem sosial ini diperlukan untuk melindungi kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki individu agar tidak diganggu oleh orang lain. Bahwa hak memang ditopang oleh negara, tetapi dalam ranah sosial belum tentu diterima. Maka kelompok minoritas LGBT menginginkan norma heteroseksual harus dihancurkan agar kelompok minoritas LGBT bisa menikmati haknya. Tuntutan terhadap hak sipil dan politik kelompok minoritas seksual LGBT selama ini adalah penegasan dari negara terhadap penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan kepentingan.

Situasi HAM LGBT memperlihatkan pemerintah kota Surabaya membiarkan stigma, diskriminasi dan kekerasan terjadi dan terus berulang-ulang, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk membangun kesadaran dan penghormatan terhadap kemanusiaan orang lain, khususnya LGBT masih kurang. Sehingga homophobia dan transphobia menjadi lebih berkembang dan orang-orang LGBT semakin tersudut dan takut untuk mengekspresikan diri ke publik. Tindakan-tindakan yang dilakukan kelompok LGBT pada masa pemerintahan Bu Risma ini cukup memperoleh dampak positif bagi mereka. Meskipun

belum sepenuhnya rasa keadilan itu mereka peroleh. Tapi bagi kelompok LGBT tidak ada usaha yang tidak memperoleh hasil.

Secara kasat mata apa yang hendak diperjuangkan oleh kelompok LGBT adalah sebuah perebutan otoritas atas tubuh dan kebebasan pilihan seksualitasnya. Karena apa yang menjadi kepentingan kelompok minoritas LGBT sangat berhubungan dengan identitas seksual mereka. Meskipun apa yang mereka lakukan belum memperoleh hasil yang diharapkan tetapi setidaknya masyarakat menerima baik dari upaya-upaya yang mereka lakukan.

Gerakan LGBT merupakan salah satu dari politik pilihan hidup yang menekankan pluralitas dan mengusung isu perbedaan seksual berdasarkan nilai-nilai universal global. Nilai yang dianut oleh gerakan LGBT mengusung isu perbedaan seksual adalah nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Dimana nilai-nilai HAM berlaku sama di seluruh negara di dunia. Bagi gerakan LGBT globalisasi merupakan salah satu motor penggerak informasi dan jaringan yang efektif menghubungkan gerakan LGBT di satu negara dengan negara yang lain.